

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teoretis

2.1.1 Partai Politik

Partai politik merupakan gabungan lapisan masyarakat yang terstruktur, Anggotanya memiliki nilai dan cita-cita yang kurang lebih sama, dan tujuan mereka adalah untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuatan politik untuk menjalankan rencana mereka. (Budiardjo Miriam, 2008)

Leon D. Epstein menjelaskan bahwa definisi partai politik yaitu selaku kelompok yang mengejar posisi pemerintah yang terkait dengan identitasnya mereka. Sigmund Neumann, di sisi lain, menyatakan partai politik merupakan organisasi yang terdefinisi dengan baik dari para aktor politik yang aktif secara sosial, yaitu mereka berfokus pada pengendalian kekuasaan pemerintah dan bersaing untuk mendapatkan dukungan rakyat dengan beberapa kelompok yang berbeda pendapat. (Cholisin, 2012)

Carl J. Friedrich juga menjelaskan partai politik merupakan suatu golongan lapisan masyarakat yang terstruktur bersifat permanen dengan tujuan mengambil alih dan juga ingin mempertahankan kontrol pemerintah atas kepemimpinan partai dan atas dasar kontrol ini, memberikan keuntungan idiil dan materiil

kepada anggota partai. (Budiardjo Miriam, 2008)

Negara demokrasi mempunyai fungsi partai politik, yaitu:

1) Sarana Komunikasi Politik

Fungsi partai politik ialah untuk membahas dan mensosialisasikan program dan kebijakan pemerintah. Adapun aliran informasi dan dialog dua arah, top-down dan bottom-up. Dengan adanya partai politik maka tuntutan rakyat dapat dikatakan sebagai jembatan antara rakyat dengan pemerintah, dan dapat dengan mudah disampaikan melalui partai politik itu sendiri.

2) Sarana Sosialisasi Politik

Sosialisasi politik dalam ilmu politik merupakan cara pandangan seseorang terhadap gejala politik serta nilai yang berlaku di masyarakat dari setiap generasinya. Maka dari itu, faktor yang terpenting dalam pembentukan budaya politik suatu negara ialah sosialisasi politik.

3) Sarana Rekrutmen Politik

Manfaat terkait dengan pemilihan pemimpin dan merupakan fungsi dari keberadaan partai politik, diperlukan partai politik mampu menarik kandidat pemimpin yang berbobot dan memudahkan mereka untuk memilih pemimpin yang unggul dan bertanggung jawab dalam politik masa depan.

Selain tingkatan tersebut, partai politik juga tertarik untuk memperluas atau menambah jangkauan anggotanya. Oleh karena itu partai politik mengusahakan agar sebisa mungkin menarik perhatian

orang untuk menjadi anggota. Karena anggota partai berasal dari kelompok yang beragam, hal ini memberikan peluang untuk memperluas partisipasi.

4) Sarana Pengatur Konflik

Konflik dimungkinkan dalam setiap lapisan masyarakat, terutama dalam masyarakat yang heterogen, baik ras, sosial ekonomi atau agama. Keberadaan partai politik ini dapat berfungsi sebagai mediator psikologis dan institusi antara warga negara dan pemerintah mereka. Fungsi politik suatu yang utama dan penting pada suatu wilayah negara yang mengikuti sistem demokratis. Sebab, pengambilan posisi penting dalam struktur ketatanegaraan harus melalui jalur politik, sehingga kualitas penyelenggara negara sangat bergantung pada peran politik yang harus dioptimalkan dalam hal ini. Hasil akhirnya yaitu terseleksi penyelenggara negara yang baik dan mampu menjalankan berbagai tugasnya dengan baik. (Strong, 2019)

Peran partai politik berpengaruh sangat besar bagi negara dan masa depan negara, karena kepemimpinan baru tercipta melalui pemilihan umum. Salah satu makna demokratisasi dalam suatu negara dan dalam kehidupan bernegara ialah diadakannya pemilihan umum yang akan membawa suatu negara menuju kepemimpinan dan pemerintahan baru yang diharapkan dapat memajukan kegiatan pada segala bidang. Maka dari itu, perubahan arah kebijakan negara dan nasional tidak terlepas dari peran partai politik yang membekali Pesta

Demokrasi Rakyat dengan berbagai visi dan misi sesuai dengan ideologi yang dijunjungnya.

2.1.2 Pemilihan Umum

Pemilihan umum yang biasa kita sebut dengan singkatan pemilu ini kemudian menjadi persoalan politik dan pergantian kepemimpinan. Karena baik itu pemilu, politik, dan pergantian kepemimpinan saling berkaitan. Pemilu yang digelar tak lebih dari isu politik terkait soal pergantian kepemimpinan.

Pemilu sangat penting bagi demokrasi yang mapan di Indonesia. Dalam pemilu, keinginan rakyat berjalan baik. Hal yang sama berlaku dalam pemilihan, di mana pemilih akan memiliki keleluasaan dan kandidat dapat menyampaikan visi, misi, dan platform calon sehingga mereka pun tau akan tujuan negara akan dibawa ke arah mana.

Secara teoretis, pemilu dipandang sebagai tahapan pertama dalam kaitan kehidupan politik yang demokratis, sehingga pemilu menjadi roda penggerak mekanisme institusi politik demokrasi.

Bagi negara yang menamakan dirinya demokrasi, pemilu ialah suatu keharusan. Pemilihan umum selama ini dipandang sebagai masalah politik yang utama karena selalu terkait dengan masyarakat untuk memenuhi syarat tertentu. Dan melalui pemilihan umum juga, masyarakat bisa menyalurkan aspirasinya secara diplomatis.

Ada beberapa asas yang digunakan pemilihan umum yang bisa dijadikan referensi pelaksanaan pemilihan umum. Prinsip tersebut perlu dijunjung tinggi dalam pelaksanaannya, karena asas tersebut juga dijadikan sasaran untuk pemilihan umum. Berikut asas-asasnya yaitu:

a. Langsung

Langsung, berarti masyarakat sebagai pemilih memiliki hak untuk memilih secara langsung dalam pemilihan umum sesuai dengan keinginan diri sendiri tanpa ada perantara.

b. Umum

Umum, berarti pemilihan umum berlaku untuk seluruh warga negara yang memenuhi persyaratan, tanpa membeda-bedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, golongan, pekerjaan, kedaerahan, dan status sosial yang lain.

c. Bebas

Bebas, berarti berarti seluruh warga negara yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih pada pemilihan umum, bebas menentukan siapa yang akan dicoblos untuk membawa aspirasinya tanpa ada tekanan dan paksaan dari siapapun.

d. Rahasia

Rahasia, berarti dalam menentukan pilihannya, pemilih dijamin kerahasiaan pilihannya. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapapun suaranya diberikan.

e. Jujur

Jujur, berarti semua pihak yang terkait dengan pemilu harus bertindak dan juga bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

f. Adil

Adil, berarti dalam pelaksanaan pemilu, setiap pemilih dan peserta pemilihan umum mendapat perlakuan sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

Maka dari itu, pemilu memiliki tujuan yang berdasarkan pasal 4 Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dalam pelaksanaannya yang berisi:

- 1) Memperkuat sistem politik yang demokratis;
- 2) Melaksanakan pemilihan umum yang berintegritas dan adil;
- 3) Menjamin stabilitas pengaturan sistem Pemilu;
- 4) Memberikan ketegasan hukum dan mengantisipasi penggandaan dalam pengaturan pemilihan umum; dan
- 5) Melaksanakan pemilihan umum yang praktis.

Setelah menyelenggarakan sebelas kali pemilu sejak kemerdekaan, Indonesia memasuki babak baru dalam dunia pemilu dengan digelarnya pemilu serentak di tahun 2019. Perubahan pada sistem ini adalah waktu pemilihan umum menjadi pemilihan serentak dengan diadakannya

pemilihan serentak. Pemilihan presiden dilaksanakan bersamaan dengan pemilihan legislatif untuk DPR, DPD, dan DPRD. Mempertimbangkan perubahan waktu pelaksanaan pemilu 2019 menjadi pemilu serentak adalah dalam semangat efisiensi dan efektivitas pelaksanaan dan hasil pemilu. Beberapa kekhawatiran yang tidak sempurna tentang pelaksanaan dan hasil pemilu sebelumnya, seperti hasil pemilu yang tidak proporsional, sistem multi-partai yang ekstrim, dan efektivitas manajemen pemerintahan, belum mencapai bentuk yang diinginkan. Oleh karena itu, berdasarkan argumentasi untuk menciptakan desain pemilu yang lebih baik demi efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di tahun 2019, Indonesia memasuki babak baru sistem pemilu dengan menggelar pemilu serentak lima kotak untuk memilih pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden, Anggota DPR RI, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi, dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

2.1.3 Strategi Politik

Istilah strategi berawal dari bahasa Yunani "*strategia*", artinya pemimpin pasukan. *Strategia* bermula dari kata *strategos* yang berkembang dari kata *stratos* (tentara) dan kata *agein* (memimpin). Kata strategi ini digunakan oleh para militer dari zaman kejayaan Yunani-Romawi sampai dengan awal industrialisasi. Kemudian kata strategi itu menyebar ke berbagai sudut pandang kehidupan masyarakat, termasuk dalam bagian komunikasi, politik dan komunikasi politik. Ini menjadi hal utama

memecahkan persoalan dalam pemenangan pertarungan pada pemilu, dan pada penentuan suatu keputusan politik lainnya. (Schroder, 2013)

Menurut Salusu, seni yang merupakan strategi memanfaatkan sumber daya suatu kelompok dan keahlian guna memperoleh sasarannya dengan menjalin hubungan yang baik dengan lingkungannya yang bermanfaat satu sama lain. (Salusu, 2006). Ada dua jenis strategi, strategi rencana dan strategi taktik. Strategi rencana merupakan sejenis program untuk meraih serangkaian tujuan atau cita-cita yang telah ditetapkan, begitupun dengan konsep strategi perencanaan. Sementara itu, strategi taktik merupakan sebuah langkah khusus untuk menbohongi pesaing. (J, 2003)

Tujuan strategi menurut Von Clausewitz yang terlihat bukan hanya kemenangan, tetapi kedamaian di baliknya. Bagi kami, mengetahui hal ini sangat penting untuk merencanakan strategi politik. Maka dari itu, ini merupakan hal yang utama untuk memastikan apa yang melatarbelakangi suatu pencapaian akhir sebuah kemenangan pemilu, atau apa yang ditetapkan saat regulasi baru diberlakukan. Banyak tujuan strategis dalam ranah politik yang terungkap, yaitu: perlombaan untuk memperkaya diri, perebutan kekuasaan, perebutan tujuan terselubung, maupun yang berbeda dari tujuan yang diumumkan secara publik. (Schroder, 2013)

Keterkaitan antara strategi dan politik merupakan keterampilan tentang cara yang dilakukan oleh ahli politik untuk merumuskan dan

melaksanakan keputusan politik sesuai dengan yang diharapkan. Seperti yang dijelaskan pada tabel di bawah ini sebagai berikut:

Tabel 2.1
Strategi Politik Menurut Peter Schroder:

Strategi Ofensif	Strategi Defensif
Strategi memperluas pasar (strategi persaingan)	Strategi mempertahankan pasar (strategi pelanggan, strategi multiplikator)
Strategi menembus pasar (strategi pelanggan)	Strategi menutup / menyerahkan pasar (strategi lingkungan sekitar)

(Sumber: Peter Schroder, 2013)

Strategi politik adalah rencana untuk tindakan, dimana penulisan dan pelaksanaan strategi mempengaruhi sukses atau gagalnya strategi itu pada akhirnya. Ada dua jenis strategi politik yang dijelaskan menurut Peter Schroder yaitu:

a. Strategi Ofensif (menyerang)

Strategi Ofensif selalu dibutuhkan jika sebuah partai berkeinginan meningkatkan partisipasinya atau jika seorang administrator ingin mengimplementasikan sebuah program. Dikarenakan semua strategi ofensif yang digunakan dalam kampanye pemilu harus menunjukkan perbedaan secara transparan dan unik antara suatu kekuatan politik dengan partai kompetitor yang ingin diambilalih oleh pemilih. Selain itu ada pula strategi persaingan yang faktual, yaitu masing-masing pihak memperebutkan sekelompok pemilih dalam rentang kemampuannya. Strategi ini harus mampu merancang sebuah acara perkenalan untuk mengartikan kepada masyarakat negosiasi mana yang

menguntungkan dibandingkan dengan partai lain. Untuk merumuskan negosiasi baru ini jika memanfaatkan perubahan nilai atau struktural yang terjadi di masyarakat. Tema yang tidak laris manis kemungkinan besar tidak akan memperluas pasar.

b. Strategi Defensif (bertahan)

Tentang strategi mempertahankan basis konstituen (pemilih tradisional) dan menutupi serangan dari pihak lain. Strategi defensif akan hadir jika salah satu partai berkuasa atau koalisi pemerintah multi partai ingin melindungi sebagian besar mayoritasnya dan jika *potential constituent* (pemilih potensial) berkeinginan mempertahankannya. Selanjutnya, strategi defensif juga hadir jika turnamen atau dasar faktor tidak lagi dipertahankan atau ingin ditutup, dan penutupannya dapat menjanjikan manfaat sebesar-besarnya.

Perancangan strategis dan proses politik untuk perubahan adalah gambaran dimana keadaan kekuasaan yang jelas tentang pencapaian akhir yang hendak diraih dan yang memusatkan seluruh upaya untuk mencapainya. Dari uraian rencana dapat ditarik perumusan tujuan masa depan, tanggapan yang diperoleh, dan identifikasi strategi untuk implementasi tujuan tersebut secara praktis.

Pada masyarakat demokratis, pengambilalihan kekuasaan dan akses terhadap akibat yang dicapai melalui berbagai bentuk pemilihan yang demokratis. Tujuannya yaitu untuk mendapatkan pangsa suara yang

cukup di pasar pemilu. Oleh karena itu, perlu adanya kekuasaan yang secara langsung dapat mempengaruhi pemilu.

Sun Tzu berkata bahwa kemampuan untuk tidak terkalahkan terletak pada diri sendiri, dan kesempatan untuk mengalahkan musuh terletak pada diri sendiri. Jadi, hal pertama yang harus dilaksanakan ialah mengatasi sendiri setiap kelemahan, menghindari serangan yang tidak perlu, dan menjadi penerima manfaat. Untuk model Sun Tzu, penilaian strategis, implementasi dan pemantauan merupakan prioritas utama perencanaan konsep. (Schroder, 2013)

Bagan 2.1
Model Perencanaan Sun Tzu:



(Sumber: Peter Schroder, 2013)

Strategi mempunyai tujuan, yaitu untuk selalu “menang”. Kemenangan itu akan tetap menjadi titik pusat, entah itu dalam pemberdayaan, perolehan suara tambahan, kandidat pemenang pemilu, atau perolehan suara mayoritas saat menetapkan aturan atau kebijakan.

Pada proses perancangan politik, ada dua prioritas. Yang pertama yaitu model perancangan berbasis SWOT dan yang kedua yaitu "rencana

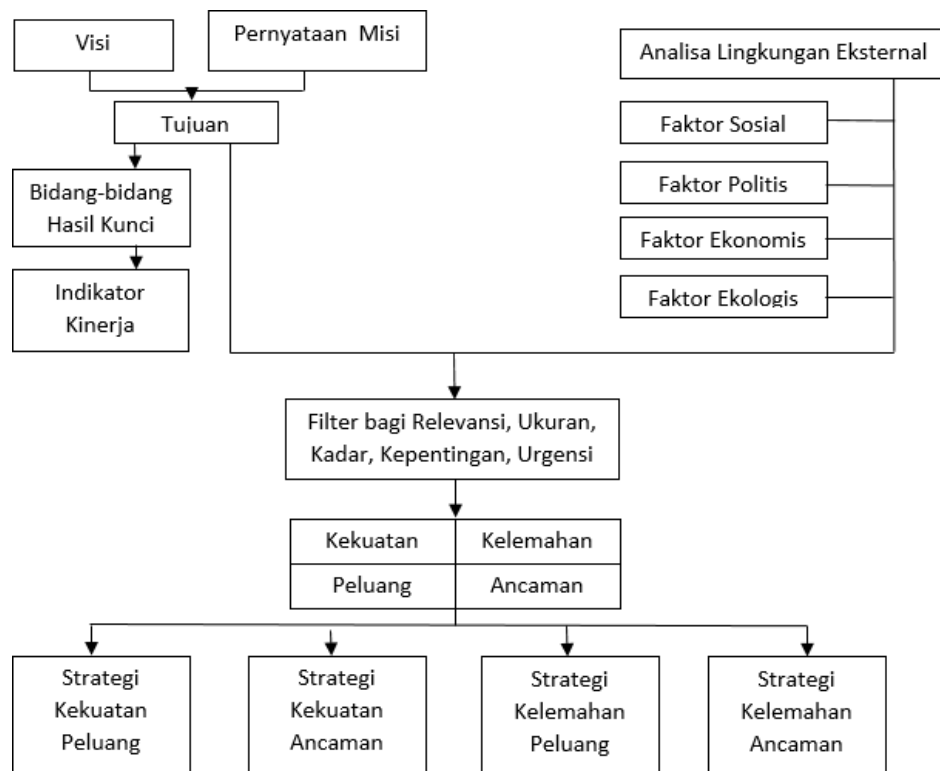
konseptual". Timbang semua potensi atau kekuatan dan kelemahan partai untuk membuat keputusan strategis yang baik dan tepat sasaran. Berbagai keputusan strategis, kebijakan, rencana, tujuan, sasaran, dan implementasi di bidang ini didasarkan pada hasil kajian lingkungan yang dilakukan sebelumnya. Outputnya adalah kajian SWOT yang sukses.

Menurut SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats*), perancangan strategis yang baik bergerak pada dua tingkatan. Pada tingkat pertama, perancangan strategis dengan jelas menggambarkan ke mana organisasi ingin pergi (visi) dan mengapa dan mengapa organisasi itu ada (definisi atau pernyataan misi). Berdasarkan dari visi dan tujuan ini, perancangan strategis mengembangkan tujuan yang mewakili hasil akhir yang dapat diukur secara kualitatif dan dihitung secara kuantitatif. Langkah ini dapat membuktikan apakah organisasi mendekati atau menjauh dari visi dan tujuan utama. Dalam hal ini, strategi harus mengidentifikasi area mana yang diharapkan menjadi tujuan utama (*key result area*), usaha apa yang diperlukan, dan area mana yang dapat dipantau dan dievaluasi menggunakan indikator kinerja tertentu. (Schroder, 2013)

Pada tingkat kedua, perencana strategis berusaha memposisikan organisasi sesuai dengan realitas lingkungan tempatnya beroperasi. Lingkungan terbagi menjadi dua jenis: lingkungan eksternal adalah area suatu kekuatan atau faktor lain melibatkan atau dilibatkan oleh organisasi, dan yang kedua yaitu lingkungan internal, yang terdiri dari sumber daya, peluang, kekuatan dan kebutuhan dalam organisasi. Perancangan strategis

diharuskan dapat mengidentifikasi dan mengevaluasi Peluang dan ancaman yang terjadi di lingkungan eksternal dalam kaitannya dengan visi dan tujuan organisasi.

Bagan 2.2
Visi, Pernyataan Misi, Tujuan, Bidang-bidang Hasil Kunci, dan Indikator Kinerja:



(Sumber: Peter Schroder, 2013)

Penjelasan memberikan arahan kepada organisasi dan dibatasi oleh visi. Ini merupakan suatu dorongan dari sebuah institusi dan juga merupakan alasan utama keberadaannya. Visi disini diharuskan cukup luas hingga dapat menginspirasi pada setiap anggotanya, namun juga harus

cukup sempit sehingga dapat fokus pada tindakan-tindakan yang harus diambil.

Sementara itu, terdapat 10 langkah perencanaan konseptual berikut adalah langkah-langkah yang terbagi dalam 3 fase, yaitu:

- 1) Perumusan misi dan kajian situasi
- 2) Keputusan strategis
- 3) Implementasi strategi

Adapun 10 langkah perencanaan tersebut ialah sebagai berikut :

1) Rumusan misi

Perumusan misi yang pertama menggambarkan perencanaan strategis yang diperlukan. Diharuskan mampu menyediakan setidaknya tiga komponen yang menguraikan tujuan keseluruhan dari posisi yang ingin dicapai. Kedua, alasan mengapa meraih tujuan keseluruhan itu penting, dan yang ketiga, kerangka waktu di mana tujuan keseluruhan harus terwujud.

2) Penilaian situasional dan evaluasi

Kebenaran yang terkumpul dikategorikan menjadi kekuatan dan kelemahan, dan kemungkinan mencapai tujuan. Fakta-fakta ini adalah kebenaran tentang organisasi itu sendiri, kebenaran tentang karyawannya, dan kebenaran tentang lingkungan di mana organisasi itu diwujudkan.

3) Rumusan sub strategi

Ketika penilaian situasi berakhir, sudah jelas bahwa strategi akan diterapkan terhadap tujuan yang telah dikembangkan atau yang masih perlu

direvisi. Rumusan strategi dibagi menjadi tiga tahap: perumusan tugas, perumusan strategi dan evaluasi strategi.

4) Rumusan sasaran

Apabila tujuan strategi sudah ditentukan lalu diserahkan kepada unit taktis untuk diterapkan melalui klasifikasi tugas. Tujuan dapat memaparkan keadaan pada akhir proses dalam jangka waktu tertentu. Sasaran ini harus dapat terwujud, dengan fokus pada poin penting yang disebutkan dalam rencana. Setelah tujuan ditentukan, strategi harus diterapkan dan terlaksana.

5) *Target image* (citra yang diinginkan)

Target image bergantung pada ketetapan strategis tentang rumusan misi dan pilihan tentang isu, gaya, jenis konfrontasi, dan pemain kunci.

6) Kelompok-kelompok target

Kelompok target yaitu sekelompok orang atau organisasi yang penting untuk mencapai misi. Mereka perlu dihubungi dalam waktu yang ditentukan. Kelompok target ini ditentukan dengan menafsirkan keputusan strategis, terutama tujuan taktis, dan dengan menganalisis citra yang diinginkan (*target image*).

7) Pesan kelompok target

Kelompok target membutuhkan informasi tertentu berdasarkan keputusan strategis yang dibuat sebelumnya, kemungkinan tanggapan sesuai dengan rencana strategis.

8) Instrumen-instrumen kunci

Pemilihan instrumen kunci dalam kaitannya dengan tindakan dan alat komunikasi yang akan digunakan disesuaikan secara khusus dengan kelompok sasaran.

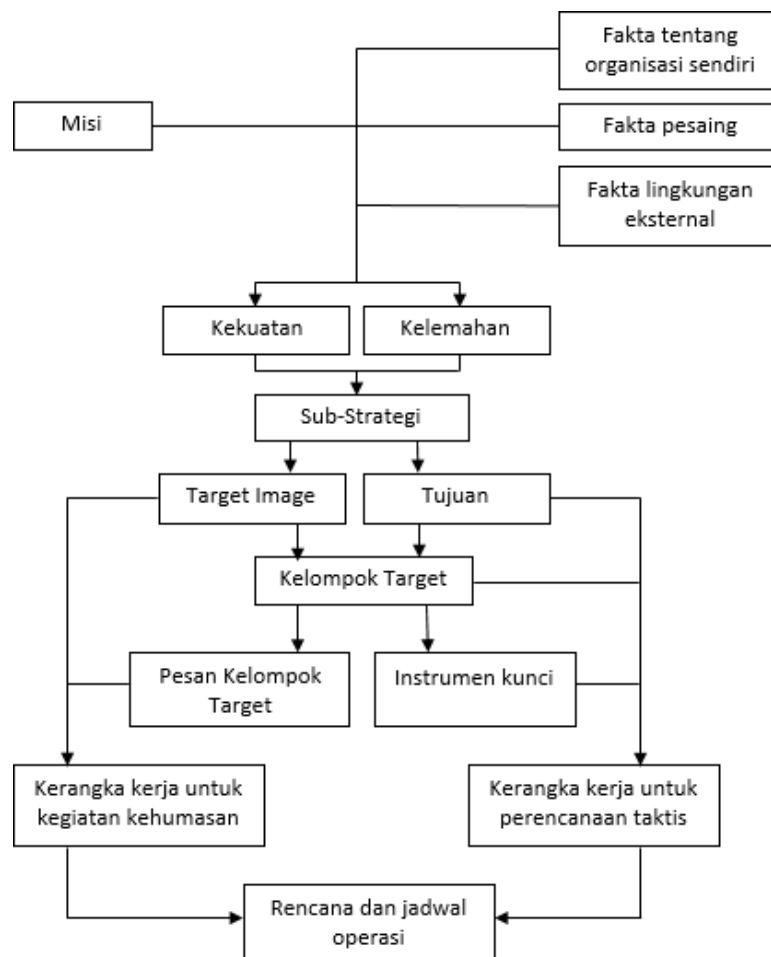
9) Implementasi strategi

Dalam implementasi strategi politik, faktor manusia menjadi sangat penting dalam tiga aspek: pemimpin politik, pemimpin partai, dan anggota partai. Kaitan antara ketiganya adalah bahwa kuantitas, kualitas, pendidikan, etika dan motivasi merupakan syarat awal keberhasilan implementasi strategi.

10) Pengendalian strategi

Pengendalian strategis mempunyai dua unsur yang menentukan berhasil atau tidaknya pengaplikasian strategi. Unsur pertama, prinsip pengumpulan data intelijen dan perolehan informasi. Elemen kedua adalah prinsip keamanan dan perlindungan informasi itu sendiri, atau mencegah penyusupan dari organisasi lawan.

Bagan 2.3
Merumuskan Misi:



(Sumber: Peter Schroder, 2013)

Dalam menerapkan strategi politik, unsur manusia penting dalam tiga bidang: pemimpin politik, pemimpin partai *full time*, dan anggota partai *part time* atau sukarela. Keterkaitan antara ketiganya, pendidikan, kualitas, kuantitas, etika dan motivasi adalah syarat awal berhasilnya pengaplikasian strategi. Pada saat yang sama di medan pertempuran, kondisi awal keberhasilannya bergantung pada prinsip kecepatan, kemampuan beradaptasi, dan penipuan. Penundaan yang tidak perlu membahayakan rencana apa pun karena penundaan hanya menyebabkan kelelahan

dan kekecewaan dalam organisasi. Oleh karena itu, penundaan harus dihindari.

(Schroder P, 2013)

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 3.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Al Rafni Palvi Herlina Syahda. (Syahda and Rafni, 2021)	Strategi Calon Legislatif Partai Gerindra dalam Memenangkan Pemilu Legislatif Tahun 2019 di Kota Padang	Dapat dilihat dari judul jurnal ini persamaannya adalah membahas tentang strategi partai gerindra yang memenangkan pemilu legislatif tahun 2019.	Adapun perbedaan yang ditemukan adalah lokasi penelitian yang berbeda yaitu di kota Padang.
2.	Hendru Sofian I. Padangi (Padangi, 2019)	Strategi Politik Partai Gerindra Dalam Memenangkan Calon Legislatif Pada Pemilu 2019 Di Kabupaten Halmahera Barat	Membahas tentang strategi partai gerindra yang memenangkan pemilu legislatif tahun 2019.	Perbedaan yang ditemukan dalam jurnal adalah lokasi penelitian yang berbeda yaitu di kabupaten Halmahera Barat.
3.	Bintang Widiowati dan Wisnu Pramutanto (Widiowati dan Pramutanto 2021)	Strategi Pemenangan Caleg Partai Gerindra Dalam Pemilu Legislatif 2019: Studi Kasus Bambang Pujiyanto Dapil 2 Sidoarjo	Jurnal ini membahas tentang strategi partai gerindra yang memenangkan pemilu legislatif tahun 2019.	Membahas mengenai salah satu caleg Partai Gerindra yaitu Bambang Pujiyanto atas strategi kemenangannya untuk yang kedua kali dalam pemilu 2019 di Kabupaten Sidoarjo.

No	Nama	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
4.	Durroh Tsaniyany Hidayat (Tsaniyany Hidayat, 2021)	RELASI BISNIS DAN POLITIK DALAM PEMILU (Studi Kasus Kemenangan Partai Gerindra pada Pileg 2019 di Kota Tasikmalaya)	Membahas tentang Strategi kemenangan Partai Gerindra pada Pileg 2019 di Kota Tasikmalaya.	Perbedaan yang ditemukan adalah kemenangan Partai Gerindra yang di dukung oleh salah satu perusahaan besar di kota Tasikmalaya. Sehingga Partai Gerindra meraih suara yang signifikan dan memperoleh kursi terbanyak di DPRD Kota Tasikmalaya

Penelitian dari Al Rafni dengan judul Strategi Calon Legislatif Partai Gerindra dalam Memenangkan Pemilu Legislatif Tahun 2019 di Kota Padang, salah satu faktor yang mendukung kemenangan Calon Legislatif Partai Gerindra adalah dukungan partai. Salah satu kelebihan caleg Partai Gerindra dibanding caleg lainnya adalah caleg dari Gerindra memiliki strategi menjangkau masyarakat sebelum mencalonkan diri, baik secara langsung di lapangan maupun dengan turun tangan. Program kerja mereka masih eksis di masyarakat hingga saat ini. Latar belakang politik dari strategi khusus yang diterapkan oleh caleg Partai Gerindra di Padang untuk memenangkan pemilihan legislatif 2019 dikenal sebagai efek Prabowo-Sandi. Karena adanya pengaruh Prabowo-Sandi, hal ini sangat mempengaruhi perolehan suara caleg Partai Gerindra dalam hal menarik perhatian publik.

Penelitian Hendru Sofian I. Padangi dengan judul Strategi Politik Partai Gerindra Dalam Memenangkan Calon Legislatif Pada Pemilu 2019 Di Kabupaten

Halmahera Barat bahwa, strategi politik yang sangat menarik dijadikan kajian dalam penelitian ini yaitu strategi politik bagaimana partai Gerindra memenangkan pemilu legislatif di basis Kabupaten Halmahera Barat. Dengan visi dan misi yang diusungnya, Partai Gerindra kemudian bertarung di Pileg 2019. Mendapat 17.594.839 suara atau 12,57%. Pembelian suara ini melewati ambang batas parlemen yang disyaratkan oleh UU No.1. Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Selain itu, di tingkat lokal, khususnya di Kabupaten Halmahera Barat, Partai Gerindra juga berhasil mengantongi 6.483 suara yang dikonversi menjadi 3 kursi. Namun, di tingkat lokal (Kabupaten Halmahera Barat), Partai Gerindra terlihat kalah juang dibanding pemilu lalu yang mampu menghasilkan 4 kursi.

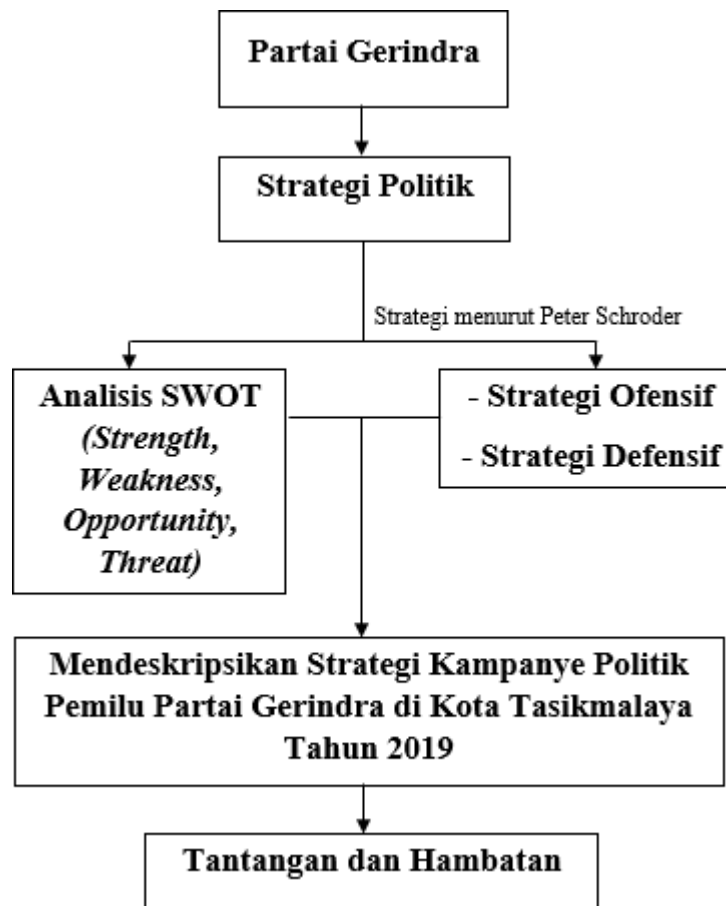
Penelitian Bintang Widiowati dan Wisnu Pramutanto dengan judul Strategi Pemenangan Caleg Partai Gerindra Dalam Pemilu Legislatif 2019: Studi Kasus Bambang Pujiyanto Dapil 2 Sidoarjo bahwa, strategi menaklukkan konstituen yang ketat seringkali menggunakan taktik pencitraan seperti blusukan, bakti sosial dan door to door. Penyusunan strategi yang tepat dan soliditas tim sukses menjadi kunci Bambang kala itu. Berdasarkan fenomena di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji strategi kemenangan caleg Partai Gerindra pada Pemilu 2019. Kajian ini berfokus pada strategi calon muda H. Bambang Pujiyanto yang terpilih kembali dengan perolehan suara yang menurun signifikan.

Penelitian Durroh Tsaniyany Hidayat dengan judul Relasi Bisnis Dan Politik Dalam Pemilu (Studi Kasus Kemenangan Partai Gerindra Pada Pileg 2019 Di Kota Tasikmalaya) bahwa, penelitian ini adalah seorang pengusaha besar di Kota Tasikmalaya yang memiliki ikatan dengan partai Gerindra pada pemilu

legislatif. Dengan kaitan itu, Partai Gerindra meraih suara penting dan meraih kursi terbanyak di DPRD Kota Tasikmalaya. Temuan dari penelitian ini adalah ikatan patron klien pada Pileg Kota Tasikmalaya 2019 diyakini sangat besar pengaruhnya terhadap kemenangan Partai Gerindra. Pengusaha yang erat kaitannya dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan menjadi pemasok kebutuhan bersaing, secara langsung atau tidak langsung melibatkan kekuatan ekonomi pengusaha akan sangat menguntungkan karena memiliki kekuatan ekonomi yang kuat. Pola hubungan tersebut dapat dilihat dengan adanya aktor komersial yang berusaha melindungi kepentingannya dengan melakukan hubungan personal atau informal dengan aktor politik.

2.3 Kerangka Pemikiran

Bagan 2.4
Kerangka Pemikiran



Penelitian ini akan membahas tentang suatu partai yaitu partai gerindra. Adapun strategi politik yang digunakan menurut Peter Schroder merupakan rencana untuk tindakan, dimana penulisan dan pelaksanaan strategi mempengaruhi sukses atau gagalnya strategi itu pada akhirnya. Dengan menggunakan analisis SWOT, yakni *Strength, Weakness, Opportunity, Threat* yang berarti kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Sementara SWOT membatasi diri pada penilaian situasi dan perumusan strategi yang bergerak lebih jauh pada evaluasi strategi dan terutama pelaksanaannya. Ada dua jenis strategi politik yang dijelaskan Peter Schroder yaitu

strategi ofensif dan strategi defensif, dimana dari kedua jenis strategi tersebut dapat mendeskripsikan strategi kampanye yang dilakukan oleh Partai Gerindra dalam menghadapi pemilu di Kota Tasikmalaya tahun 2019 agar bisa mendapatkan perhatian dari masyarakat untuk mendapatkan perolehan suara yang banyak. Dalam berkampanye pun tidak akan selalu berjalan mulus. Oleh karena itu akan ada beberapa tantangan dan hambatan selama proses berkampanye.